RENCANA KERJA
TAHUN 2018

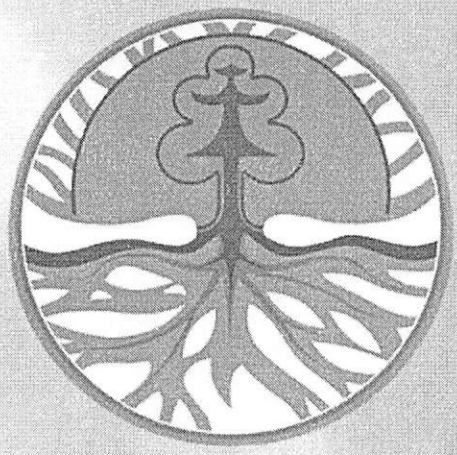

DIREKTORAT
RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN
(029.06.0199.400198.KP)

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lt. 5
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat-Nya, kami diberi kemampuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kami yaitu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan HutanTahun 2018.

Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga ada arah yang jelas dari program/kegiatan pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Dalam proses penyusunannya, dokumen rencana kerja Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mengacu pada rencana kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan Tahun 2018 dan Rencana Strategis Direktorat Rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan Hutan. Dengan acuan dokumen tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dilakukan dengan focus terhadap kondisi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, evaluasi pelaksanaan Renja Direktorat RPP tahun sebelumnya dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra Direktorat Jenderal RPP Tahun 2015-2019.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran, maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan.

Sebagai penutup, kami berharap Renja Direktorat RPP ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi yang merupakan salah satu pengungkit tercapainya visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, Nopember 2017
Direktur

Ir.Kustanta Budi Prihatno,M Eng
NIP. 19600411 198703 1 001

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	PENDAHULUAN		
	A	Latar Belakang.....	1
	B	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
	C	Struktur Organisasi dan SDM.....	3
BAB II.	CAPAIAN KINERJA.....		5
BAB III.	RENCANA KERJA TAHUN 2018.....		9
BAB IV.	PENUTUP.....		10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2015-2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan

serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan
6. wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018 mendapat tugas melaksanakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan sasaran Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk melaksanakan kegiatan Perencaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2018, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100% dengan output (keluaran) sebagai berikut:

1. Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku, 100%
2. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH,92 KPH
3. Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 Provinsi
4. Jumlah KPH terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang wilayah, 34 Provinsi
5. Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK, 34 Provinsi
6. Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 3 dokumen.
7. Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institusional Development Project, 1 Laporan
8. Data Areal Perhutanan Sosial Jawa, 4 Provinsi
9. Layanan Perkantoran, 1 Layanan

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2018 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2018
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan/tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan bahwa Direktorta Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan, Struktur Organisasi (*gambar terlampir*) terdiri dari atas :

1. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan;
2. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan;
3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan;
5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi; dan
6. Subbagian Tata Usaha.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada tiap – tiap Subdirektorat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirtektorat, 1 Orang Kepala Seksi Penyusunan Rencana Makro Kehutanan, 1 Orang Kepala Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dan 14 orang Staff PNS , 1 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN

2. Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang Kepala Subdirektorat, 1 orang Kepala Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilatah 1, 1 orang Kepala Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilatah 2, dan 13 Orang Staff

3. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang kepala seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah 1, 1 orang kepala seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah 2, dan 16 orang staff PNS , 1 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN

4. Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang kepala seksi pembentukan wilayah pengelolaan hutan, 1 orang kepala seksi alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan 12 orang staff PNS , 3 orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN, 1 Orang Tenaga Outsorcing

5. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi , terdiri dari 1 orang kepala Subdirektorat, 1 orang Kepala Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi PKH, 1 orang kelapa seksi Informasi Spasial dan Dokementasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dan 20 orang staff, 3 Orang Tenaga Outsorcing

6. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 7 orang Staff PNS , 8 Orang Staff Tenaga Kontrak PPNPN

II. CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Tahun 2018 merupakan tahun keempat periode pembangunan lima tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat meletakkan kondisi pemungkin bagi akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya. Kegiatan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2018 diharapkan dapat menyiapkan instrumen dan regulasi untuk mendukung Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi dan Penggunaan Kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2016 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian sasaran kegiatan sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

Sasaran kegiatan sesuai Renstra 2015-2019	Tahun 2016	
	Target 2016 (s/d 2016)	Realisasi
1. Pembentukan 409 unit KPh serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	100 KPH dan 34 Provinsi Integrasi 338 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTK	100 KPH dan 34 Provinsi Integrasi 338 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTK
2. Penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air dengan layanan minimal 80%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%

Sasaran kegiatan sesuai Renstra 2015-2019	Tahun 2016	
	Target 2016 (s/d 2016)	Realisasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	12 bulan layanan	100%

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

Tahun	Anggaran	Serapan / Realisasi 2016	Prognosis 2017	%
2016	6.128.014.000	5.396.698.372		88,07
2017	15.388.583.000		12.500.699.207	81,23

III. RENCANA KERJA TAHUN 2018

Pada Tahun 2018, kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan masuk dalam kegiatan prioritas nasional. Adapun kegiatan yang masuk dalam Proyek Prioritas Nasional adalah kegiatan Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan. Sedangkan kegiatan yang termasuk dalam Proyek Kementerian / Lembaga adalah :

- Penelaahan dan Penyelesaian penetapan kawasan Hutan
- Penyusunan Peta Penetapan dan Fasilitasi Kelembagaan KPH
- Penyusunan rancangan tata hutan dan rancanagan rencana pengelolaan hutan KPH

Berikut adalah Matrik Penjabaran Kegiatan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018.

No.	Kegiatan/Sasaran	Indikator	Komponen Kegiatan	Keterangan
1	Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
	Tersedianya Peta Penatapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Fasilitasi Kelembagaan KPH	Program Prioritas Pembangunan Pedesaan
		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based natural Resource Management and Institusional Development Project	Forest Invesment Program Project 2 (FIP)	PP Bidang / Reguler
	Pembentukan Unit KPH serta Penataan ruang wilayah 34 provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate	Penyusunan /update peta arahan pemanfaatan hutan	PP Bidang / Reguler

No.	Kegiatan/Sasaran	Indikator	Komponen Kegiatan	Keterangan
		setiap tahun	mendukung KPH	
		Jumlah KPH yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	PP Bidang / Reguler
			Penyusunan /penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	PP Bidang / Reguler
		Jumlah KPH terintegrasi dalamRKTN,RKTP dan RKTK	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	PP Bidang / Reguler
	Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketananan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	PP Bidang / Reguler
			Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	PP Bidang / Reguler
	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan kawasan hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan kawasan hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi , Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah	PP Bidang Reguler

No.	Kegiatan/Sasaran	Indikator	Komponen Kegiatan	Keterangan
			Pengelolaan Hutan	
	Tersedianya data areal perhutanan sosial Jawa	Data areal perhutanan sosial jawa	Penyediaan data areal perhutanan sosial jawa	PP Performa Agraria

Upaya pencapaian sasaran tersebut diantaranya didukung melalui kegiatan fasilitasi pembangunan 92 KPH, Fasilitasi Pembangunan KPH diarahkan pada upaya penyiapan/prakondisi dalam rangka mendukung operasionalisasi KPH melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH. Dengan terkendalinya penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan diharapkan tata kelola hutan pada tingkat tapak lebih terintegrasi dan dapat mengakomodasi target pembangunan kehutanan nasional/provinsi pada tingkat tapak.

Tabel Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan, Pembangunan 92 unit KPH Tahun 2018

BPKH	Provinsi	KPH
Wilayah I Medan	Sumatera Utara dan Sumatera Barat	8
Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan	2
Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat	11
Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur & Utara	15
Wilayah V Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1
Wilayah VI Manado	Sulawesi Utara dan Maluku Utara	5
Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	1
Wilayah VIII Denpasar	Bali dan Nusa Tenggara Barat	3
Wilayah IX Maluku	Maluku	4
Wilayah X Jayapura	Papua	18
Wilayah XI Jawa Madura	Jawa	0
Wilayah XII Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	0
Wilayah XIII Pangkal Pinang	Bangka Belitung dan Jambi	4
Wilayah XIV Kupang	NTT	3
Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo	1
Wilayah XVI Palu	Sulawesi Tengah	3
Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	8
Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh	0
Wilayah XIX Pekanbaru	Riau	1
Wilayah XX Bandar Lampung	Lampung Bengkulu	1
Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	0

BPKH	Provinsi	KPH
Wilayah XXII Kendari	Sulawesi Tenggara	3
Jumlah		**92**

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 45.089.110.000,- dengan komposisi RM = Rp. 10.890.826.000, HLN = Rp. 34.198.284.000. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2018.

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan tahun 2017 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018 merupakan acuan utama bagi seluruh Sub Direktorat lingkup Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2018 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh investasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di Tahun 2018, yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2018, dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018 dan DIPA TA. 2018 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Direkrat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

III. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN TAHUN 2018

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**
Pelaksana : **DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen/Elemen Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	92 KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan fasilitasi Kelembagaan KPH	92 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Draft Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	92 KPH	001	Penelaahan dan Pembahasan Usulan Penetapan KPH (92 KPH)	
									002	Penyajian Peta Penetapan KPH	
									003	Penyusunan Substansi Peraturan Perundangan Prakondisi Pembangunan KPH	
									004	Pemantauan Proses Pembangunan KPH Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014	
									005	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	
	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1 Laporan	Tersedianya kebijakan KemenLHK (PP, Permen, Perdirjen, SOP)	Draft kebijakan KemenLHK (PP, Permen, Perdirjen, SOP)	Kebijakan dan Pengembangan, Revisi dan Peubahan Peraturan Perundangan	1 Laporan Kegiatan	001	Pengembangan efektivitas pelaksanaan pengukuhan dan penggunaan lahan dalam dan sekitar KPH	
									002	Pengembangan mekanisme pembiayaan untuk menyediakan dana nasional seperti APBN dan atau APBD setempat untuk membiayai KPH	
									003	Perbaikan dan perubahan peraturan pemerintah untuk penggunaan keuangan negara	
									004	Pengembangan kebijakan di tingkat masyarakat	
									005	Pengembangan kebijakan di tingkat masyarakat	
									006	Pengembangan sistem monitoring dan pelaporan pada semua pemegang lisensi	
									007	Penetapan KPH sebagai PPK BLUD	
									008	Pengembangan kapasitas perencanaan ruang di tingkat nasional dan daerah	
									009	Persiapan metodologi dan petunjuk teknis uuntuk penyiapan perencanaan di KPH	
									010	Pengembangan SDM KPH dan kapasitas perencanaan pengelolaan	
									011	Biaya operasional untuk unit pendukung di tingkat tapak	
									012	Implementasi Proyek	
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	34 Provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan mendukung KPH di 34 Provinsi	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi tersusun /terupdate	Penyusunan/Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH	34 Provinsi	001	Penyusunan/Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen/Elemen Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
									007	Penataan Arsip Pada Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
									008	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan KPH	
									009	Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH	
									010	Optimalisasi Pengembangan Pemanfaatan Sinpasdok KPH +	
									011	Penyelenggaran Publikasi KPH	
									012	Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Policy)	
									013	Analisis dan Penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Policy	
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	4 Provinsi	001	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Jawa	
Dukungan Manajemen kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	1 Layanan	Terlaksananya Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan Layanan Perkantoran (Operasional)	1 Layanan	001	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	
	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	Terlaksananya layanan internal organisasi (good governance) kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Informasi pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Layanan Internal organisasi	1 Layanan	001	Layanan Internal organisasi	
	Layanan Internal (overhead)	12 Bulan/Layanan	Layanan Internal (overhead)	12 Bulan/Layanan	Terlaksananya Layanan organisasi (overhead)	Informasi pelaksanaan Layanan organisasi (overhead)	Informasi pelaksanaan Layanan organisasi (overhead)	12 Bulan/Layanan	001	Layanan internal (overhead)	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen/Elemen Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
					Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 provinsi	Arahan Pemanfaatan Hutan menjadi acuan/pedoman dalam penetapan areal pemanfaatan hutan	Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK)	34 Provinsi	001	Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK)	
	Jumlah KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	34 Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	Penataan ruang kawasan hutan mendukung KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	100 KPH dan 34 provinsi	001	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW Berbasis 600 KPH/ Penyusunan Rencana Kawasan Hutan	
			Penyusunan/Penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	100% (persen)	Tersedianya Regulasi penataan ruang kawasan hutan	Draft regulasi penataan ruang kawasan hutan	Penyusunan/Penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	100%	001	Penyusunan/Penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK	34 Provinsi	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	34 Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan Mendukung KPH	34 provinsi	001	Pengintegrasian RKTN dengan KPH	
									001	Penyempurnaan sistem perencanaan kehutanan	
									002	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	
Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100% (persen)	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	100% (persen)	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani dan terkendali	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	100%	001	Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	
									002	Klarifikasi Permasalahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	
									003	Peningkatan Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	
									004	Supervisi Monitoring/Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	
									005	Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Lahan Kompensasi	
			Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100% (persen)	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Tercapainya Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Veriifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100%	001	Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBP	
									002	Monitoring Pembayaran PNBP PKH (6 Provinsi) ,Laporan Hasil Monitoring Pembayaran PNBP-PKH, 12 judul	
									003	Supervisi Verifikasi PNBP PKH, 6 lokasi, Laporan Hasil Supervisi Verifikasi PNBP-PKH, 6 Judul	
									004	Pengembangan Aplikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	
Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen	Tersedianya data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	001	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH	
									002	Supervisi Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang IPPKH	
									003	Update Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan, 34 Provinsi	
									004	Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Penggunaan Kawasan Hutan	
									005	Publikasi Penggunaan Kawasan Hutan	
									006	Konfirmasi Lokasi Permohonan IPPKH	

Lokus Proyek Penyusunan Peta Penetapan dan Fasilitasi Kelembagaan KPH Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten	UNIT	Jenis KPH (Evaluasi)
1	SUMATERA BARAT	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	UNIT XI - KPHP	KPHP
2	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	UNIT III - KPHP	KPHP
		KAB. LABUHAN BATU		
		KAB. LABUHAN BATU UTARA		
		KAB. LABUHAN BATU UTARA	UNIT IX - KPHL	KPHL
		KAB. DELI SERDANG	UNIT V - KPHP	KPHP
		KAB. LANGKAT		
		KAB. SAMOSIR	UNIT XIX - KPHL	KPHL
		KAB. TAPANULI UTARA	UNIT XXI - KPHP	KPHP
		KAB. TOBA SAMOSIR		
		KAB. NIAS	UNIT XXXII - KPHL	KPHL
		KAB. NIAS SELATAN		
		KAB. NIAS SELATAN	UNIT XXXIII - KPHP	KPHP
3	SUMATERA SELATAN	Kab. OKU Selatan	UNIT XVII - KPHL	KPHL
		Kab. OKU Selatan	UNIT XVIII - KPHL	KPHL
4	KALIMANTAN BARAT	KAB. BENGKAYANG	UNIT II - KPHP	KPHP
		KAB. LANDAK		
		KAB. SAMBAS		
		KAB. BENGKAYANG	UNIT III - KPHP	KPHP
		KAB. LANDAK		
		KAB. SANGGAU		
		KAB. SANGGAU	UNIT IV - KPHP	KPHP
		KAB. SINTANG		
		KAB. SANGGAU	UNIT IX - KPHP	KPHP
		KAB. SINTANG		
		KAB. SANGGAU	UNIT XII - KPHP	KPHP
		KAB. SEKADAU		
		KAB. SINTANG	UNIT XVII - KPHP	KPHP
		KAB. MELAWI	UNIT XXII - KPHP	KPHP
		KAB. KAYUNG UTARA	UNIT XXVI - KPHP	KPHP
		KAB. KETAPANG		
		KAB. KETAPANG	UNIT XXVII - KPHP	KPHP
		KAB. KETAPANG	UNIT XXVIII - KPHP	KPHP
		KAB. KAPUAS HULU	UNIT XXXIV - KPHP	KPHP
		KAB. SEKADAU		
		KAB. SINTANG		
5	KALIMANTAN UTARA	KAB. NUNUKAN	UNIT I - KPHL	KPHL
		KAB. MALINAU	UNIT II - KPHP	KPHP
		KAB. NUNUKAN	UNIT III - KPHP	KPHP
		KAB. NUNUKAN	UNIT IV - KPHP	KPHP
		KAB. TANAH TIDUNG	UNIT V - KPHP	KPHP
		KAB. BULUNGAN	UNIT VIII - KPHP	KPHP
		KAB. KUTAI TIMUR	UNIT XIX - KPHP	KPHP

No	Provinsi	Kabupaten	UNIT	Jenis KPH (Evaluasi)
		KAB. MALINAU	UNIT XV - KPHP	KPHP
6	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	UNIT XVI - KPHP	KPHP
		KAB. KUTAI TIMUR	UNIT XVII - KPHP	KPHP
		KAB. MALINAU	UNIT XXI - KPHP	KPHP
		KAB. KUTAI BARAT	UNIT XXIII - KPHP	KPHP
		KAB. KUTAI BARAT	UNIT XXIV - KPHP	KPHP
		KAB. KUTAI BARAT	UNIT XXV - KPHP	KPHP
		KAB. KUTAI KARTANEGARA		
		KOTA SAMARINDA	UNIT XXVIII - KPHP	KPHP
7	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BALANGAN	UNIT IV - KPHL	KPHL
		KAB. BANJAR		
		KAB. HULUSUNGAI TENGAH		
		KAB. KOTABARU		
		KAB. TANAHBUMBU		
8	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA BARAT	UNIT III - KPHL	KPHL
		KAB. HALMAHERA UTARA		
		KAB. HALMAHERA BARAT	UNIT XI - KPHL	KPHL
		KOTA TERNATE		
		KOTA TIDORE KEPULAUAN		
		KAB. HALMAHERA SELATAN	UNIT XIV - KPHP	KPHP
		KAB. KEPULAUAN SULA	UNIT XV - KPHP	KPHP
9	SULAWESI UTARA	BOLAANGMONGONDOW	UNIT VII - KPHP	KPHP
		BOLAANGMONGONDOW TIMUR		
		MINAHASA SELATAN		
		MINAHASA TENGGARA		
10	SULAWESI SELATAN	KAB. BARRU	UNIT VIII - KPHP	KPHP
		KAB. BONE		
		KAB. GOWA		
		KAB. MAROS		
		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
		KAB. SINJAI		
		KAB. SOPPENG		
		KAB. WAJO		
11	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	UNIT II - KPHP	KPHP
		KAB. LOMBOK TENGAH		
		KAB. BIMA	UNIT XVII - KPHP	KPHP
		KAB. DOMPU		
		KAB. BIMA	UNIT XXI - KPHP	KPHP
12	MALUKU	KAB. MALUKU TENGAH	UNIT IX - KPHL	KPHL
		KAB. MALUKU TENGAH	UNIT VIII - KPHP	KPHP
		KAB. SERAM BAGIAN TIMUR		
		KAB. MALUKU BARAT DAYA	UNIT XIX - KPHP	KPHP
		KAB. MALUKU BARAT DAYA	UNIT XX - KPHP	KPHP
13	PAPUA	KAB. NABIRE	UNIT I - KPHL	KPHL
		KAB. NABIRE	UNIT IX - KPHP	KPHP

No	Provinsi	Kabupaten	UNIT	Jenis KPH (Evaluasi)
		KAB. PANIAI		
		KAB. WAROPEN		
		KAB. BOVEN DIGOEL	UNIT L - KPHP	KPHP
		KAB. MAPPI		
		KAB. PEGUNUNGAN BINTANG		
		KAB. YAHUKIMO		
		KAB. BOVEN DIGOEL	UNIT LII - KPHP	KPHP
		KAB. PEGUNUNGAN BINTANG		
		KAB. MERAUKE	UNIT LIV - KPHP	KPHP
		KAB. MIMIKA	UNIT VII - KPHL	KPHL
		KAB. PANIAI		
		KAB. MEMBERAMO RAYA	UNIT XIII - KPHP	KPHP
		KAB. WAROPEN		
		KAB. ASMAT	UNIT XLV - KPHL	KPHL
		KAB. MAPPI		
		KAB. ASMAT	UNIT XLVI - KPHP	KPHP
		KAB. BOVEN DIGOEL		
		KAB. MAPPI		
		KAB. MEMBERAMO RAYA	UNIT XV - KPHP	KPHP
		KAB. WAROPEN		
		KAB. MEMBERAMO RAYA	UNIT XVIII - KPHL	KPHL
		KAB. WAROPEN		
		KAB JAYAPURA	UNIT XXVI - KPHL	KPHL
		KAB. KEEROM		
		KAB. KEEROM	UNIT XXXI - KPHL	KPHL
		KAB. PEGUNUNGAN BINTANG		
		KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	UNIT XXXIV - KPHL	KPHL
		KAB. YAHUKIMO	UNIT XXXIX - KPHL	KPHL
		KAB. YAHUKIMO	UNIT XXXVI - KPHL	KPHL
		KAB. YAHUKIMO	UNIT XXXVII - KPHL	KPHL
		KAB. YAHUKIMO	UNIT XXXVIII - KPHL	KPHL
14	JAMBI	KAB. BUNGO	UNIT II - KPHP	KPHP
15	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA SELATAN	UNIT IX - KPHP	KPHP
		KAB. BELITUNG	UNIT XI - KPHP	KPHP
		KAB. BELITUNG	UNIT XII - KPHL	KPHL
		KAB. BELITUNG TIMUR		
16	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA BARAT	UNIT XII - KPHP	KPHP
		KAB. SUMBA BARAT DAYA		
		KAB. SABU RAIJUA	UNIT XV - KPHL	KPHL
		KOTA KUPANG	UNIT XVIII - KPHL	KPHL
17	GORONTALO	KAB. POHUWATO	UNIT I - KPHP	KPHP
18	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	UNIT XII - KPHP	KPHP
		KAB. MOROWALI UTARA	UNIT XV - KPHP	KPHP

No	Provinsi	Kabupaten	UNIT	Jenis KPH (Evaluasi)
		KAB. POSO		
		KAB. TOJO UNAUNA		
		KAB. TOJO UNAUNA	UNIT XVIII - KPHP	KPHP
19	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI	UNIT III - KPHL	KPHL
		KAB. MAYBRAT		
		KAB. SORONG		
		KAB. TAMBRAUW		
		KAB. MAYBRAT	UNIT VII - KPHP	KPHP
		KAB. SORONG SELATAN		
		KAB. TELUK BINTUNI		
		KAB. TELUK BINTUNI	UNIT VIII - KPHP	KPHP
		KAB. MANOKWARI	UNIT X - KPHP	KPHP
		KAB. MAYBRAT		
		KAB. TELUK BINTUNI		
		KAB. MANOKWARI	UNIT XI - KPHP	KPHP
		KAB. TELUK BINTUNI		
		KAB. TELUK WONDAMA		
		KAB. MANOKWARI	UNIT XIII - KPHL	KPHL
		KAB. TELUK BINTUNI		
		KAB. TELUK WONDAMA		
		KAB. FAKFAK	UNIT XVIII - KPHP	KPHP
		KAB. KAIMANA		
		KAB. KAIMANA	UNIT XX - KPHP	KPHP
		KAB. TELUK WONDAMA		
20	RIAU	KAB. ROKAN HILIR	UNIT XI - KPHP	KPHP
		KAB. ROKAN HULU		
21	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	UNIT I - KPHP	KPHP
22	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON	UNIT I - KPHP	KPHP
		KAB. BUTON	UNIT II - KPHP	KPHP
		KAB. KOLAKA UTARA	UNIT XVII - KPHP	KPHP
	TOTAL		**92 KPH**	